



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 136 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 179 TAHUN 2019 **TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung maupun Operasional Pemerintahan Kampung, untuk keseragaman honorarium dan biaya lainnya agar efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 179 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung, perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 179 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 179 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Siak Nomor 179 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 179) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 136 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

**STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN KAMPUNG DI
KABUPATEN SIAK**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Honorarium Tenaga Administrasi Kampung		
	a. Staf Kantor Kampung	OB	1.200.000
	b. Penjaga Kantor Kampung	OB	800.000
	c. Petugas Kebersihan Kampung	OB	800.000
	Keterangan : - Staf Kantor Kampung diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan kampung.		
2.	TPK untuk Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : (Ketua, Sekretaris, Anggota)		
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,-		
	- Ketua	OP	180.000
	- Sekretaris	OP	170.000
	- Anggota	OP	160.000
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa Rp50.000.000,- s.d Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OP	200.000
	- Sekretaris	OP	190.000
	- Anggota	OP	180.000
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OP	220.000
	- Sekretaris	OP	210.000
	- Anggota	OP	200.000
	Keterangan : - Tim Pelaksana Kegiatan menerima honorarium Sesuai dengan jumlah Pekerjaan ditetapkan dengan surat Keputusan Penghulu		
3.	Honorarium Tim /Panitia		
	- Pembina/penanggung jawab	OK	400.000
	- Ketua	OK	300.000
	- Sekretaris	OK	250.000
	- Anggota	OK	150.000
	Keterangan : - Tim/ Panitia ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
4.	Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar		
	a. Penceramah Narasumber/Trainer		
	- Esselon II/Dipersamakan/Fungsional Madya	Perjam	1.000.000
	- Esselon III/Dipersamakan/Fungsional Muda	Perjam	800.000
	- Esselon IV/Dipersamakan/Fungsional Pertama	Perjam	700.000
	- Non Esselon	Perjam	600.000
	b. Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar	OJP	250.000
	Keterangan : - OJP (Orang Jam Pelajaran) = 45 Menit - Transfortasi Narasumber disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas. - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		

5.	Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Per hari	70.000
	Keterangan : - Transfortasi Peserta disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas. - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
6.	Honorarium Pelaksana Petugas Keamanan Pemilihan Penghulu		
	1. Kepolisian/Babinsa	OK	200.000
	2. Linmas Kampung	OK	150.000
	Keterangan : - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
7.	Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi		
	a. Dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,-	Paket/Pekerjaan	1.000.000
	b. Dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa Rp50.000.000,- s.d Rp200.000.000,-	Paket/Pekerjaan	1.350.000
	c. Dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp200.000.000,-	Paket/Pekerjaan	1.700.000
	Keterangan : - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
8	Insentif Kader		
	a. Kader Posyandu	OB	200.000
	b. Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	500.000
	c. Kader/Guru PAUD Milik Kampung	OB	500.000
	Keterangan : - Sumber dana dari Dana Kampung APBN - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
9.	Kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Penghulu Kampung.	LS	21.000.000
	Keterangan : 1. Kegiatn Pemungutan Suara Pemilihan Penghulu Kampung Sumber Dana Bantuan Kabupaten sebesar Rp.11.000.000,- Penggunaannya disesuaikan dengan Ketentuan. 2. Kegiatn Pemungutan Suara Pemilihan Penghulu Kampung Sumber Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.10.000.000,- Penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan dan/atau kebutuhan pada hari pelaksanaan. 3. ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
10.	Purna Bakti Penghulu	LS	50.000.000
	Keterangan : 1. Dibayarkan apabila sudah berakhir pada masa jabatan dan tidak terpilih kembali sebagai Penghulu. 2. Dibayarkan apabila meninggal dunia.		
11.	Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan		
	Keterangan : 1 Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung		
12.	Belanja Pemakaian air, telepon, listrik	Tahun	
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		

13. Belanja Pemakaian Internet	Bulan	
Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
14. Standar Biaya BBM 1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Pemerintah, 2 (dua) Liter/hari	Liter/hari	
Keterangan : - Jumlah hari disesuaikan dengan jumlah hari kerja - Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung - BBM yang digunakan adalah BBM Jenis Premium		
15. Pengurusan Pajak dan Biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	LS	
Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
16. Satuan Biaya Makan Minuman Harian/Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya dilingkungan Pemerintahan Kampung		
a. Makanan Minuman Harian 1. Makan 2. Snack	Ktk/Bks Ktk/Bks	25.000 10.000
Keterangan : Jumlah hari disesuaikan dengan Hari Kerja		
b. Makanan Minuman Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya 1. Makan 2. Snack	Perhari Perhari	50.000 20.000
Keterangan : 1. Untuk Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya. 2. Makan Rp.50.000,- untuk 2 Kali Perhari dan Snack Rp.20.000,- untuk 2 Kali/Perhari		
Keterangan : 1. Jumlah Hari disesuaikan dengan Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya		
17. Belanja Pakaian Dinas 1. Pakaian Dinas Penghulu, Perangkat Kampung, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Kampung, BAPEKAM dan Lembaga yang diakui kampung.	Stel	500.000
Keterangan : Untuk Belanja Pakaian Kegiatan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan Harga yang wajar mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung.		
18. Belanja Bahan Material		
Keterangan : 1 Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung		

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

STANDARISASI PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN KAMPUNG

A. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kabupaten Lebih Dari 8 Jam.

NO	PELAKSANA	DALAM KABUPATEN SIAK LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1	STAF PNS GOL III	150,000	OH
2	STAF PNS GOL II	150,000	OH

Catatan :

1. Khusus untuk Kecamatan Dayun, Gasib dan Bungaraya lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu/Ketua BAPEKAM disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya/Wakil/Sekretaris/Anggota BAPEKAM disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II.

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kabupaten Siak Diatas 8 Jam

NO	PELAKSANA	TARIF HOTEL (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1	STAF PNS GOL III	400,000	OH
2	STAF PNS GOL II	300,000	OH

Catatan :

1. Perjalanan dinas Maksimal 2 (dua) hari Kecuali untuk kegiatan Survey, Pendataan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu/Ketua BAPEKAM disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya/Wakil/Sekretaris/Anggota BAPEKAM disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II.

**B. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK SRI INDRAPURA KE
KECAMATAN (PP) UNTUK DUA KALI JALAN (PULANG PERGI)**

NO	DAERAH YANG DITUJU	IBUKOTA KECAMATAN (Rp.)	KEPEDALAM AN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Siak Sri Indrapura / Mempura - Sekitarnya disesuaikan		-	Catatan: untuk tujuan daerah lain yang disesuaikan mulai dari Rp. 50.000; s/d Rp. 200.000; yang disesuaikan dengan kondisi Rill
2	Siak Sri Indrapura - Dayun	50,000	-	
3	Siak Sri Indrapura - Koto Gasib	100,000	-	
4	Siak Sri Indrapura - Lubuk Dalam	100,000	-	
5	Siak Sri Indrapura - Kerinci Kanan	120,000	-	
6	Siak Sri Indrapura - Tualang	120,000	-	
7	Siak Sri Indrapura - Minas	150,000	200,000	Kampung Rantau Bertuah dan Mandi Angin
8	Siak Sri Indrapura - Kandis	170,000	250,000	Kampung Pencing Bekulo, Sungai Gondang dan Garut
9	Siak Sri Indrapura - Bungaraya	50,000		
10	Siak Sri Indrapura - Sungai Mandau	150,000	250,000	Kampung Tasik Betung
11	Siak Sri Indrapura - Sungai Apit	120,000	1,000,000	Kampung Teluk Lanus
12	Siak Sri Indrapura - Sabak Auh	100,000		
13	Siak Sri Indrapura - Pusako	100,000		

**C. BIAYA TRANSPORTASI DARI KECAMATAN KE DESA/KAMPUNG (PP)
UNTUK DUA KALI JALAN (PULANG PERGI)**

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JARAK (KM)	SATUAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SIAK	Kampung Rempak	0-5 Km	Rp 50,000	0 Km - < 10 Km Rp 50.000,-
		Kampung Dalam	7 Km	Rp 50,000	10 Km - < 20 Km Rp 80.000,-
		Langkai	7 Km	Rp 50,000	20 Km - < 30 Km Rp 100.000,-
		Suak Lanjut	8 Km	Rp 50,000	> 30 Km, Daerah Terpencil
		Rawang Air Putih	16 Km	Rp 80,000	dan Daerah Sangat Terpencil
		Merempan Hulu	22Km	Rp 100,000	Menyesuaikan Kondisi Rill
		Buantan Besar	22 Km	Rp 100,000	
		Tumang	29 Km	Rp 100,000	
2	MEMPURA	Benteng Hilir	6 Km	Rp 50,000	
		Benteng Hulu	6 Km	Rp 50,000	
		Paluh	6 Km	Rp 50,000	
		Kampung Tengah	10 Km	Rp 80,000	
		Sei Mempura	15 Km	Rp 80,000	
		Kota Ringin	25 Km	Rp 100,000	
		Merempan Hilir	20 Km	Rp 100,000	
		Teluk Merempan	25 Km	Rp 100,000	
3	BUNGA RAYA	Bunga Raya	7 Km	Rp 50,000	
		Langsat Permai	12 Km	Rp 80,000	
		Jatibaru	12 Km	Rp 80,000	
		Kemuning Muda	12 Km	Rp 80,000	

1	2	3	4	5	6
4	DAYUN	Jayapura	12 Km	Rp	80,000
		Dayang Suri	12 Km	Rp	80,000
		Temusai	13 Km	Rp	80,000
		Suak Merambai	13 Km	Rp	80,000
		Buantan Lestari	13 Km	Rp	80,000
		Tuah Indrapura	14 Km	Rp	80,000
		Dayun	0-5 Km	Rp	50,000
		Banjar Seminai	5 Km	Rp	50,000
		Pangkalan Makmur	7 Km	Rp	50,000
		Berumbung Baru	12 Km	Rp	80,000
	KOTO GASIB	Suka Mulia	15 Km	Rp	80,000
		Teluk Merbau	16 Km	Rp	80,000
		Merangkai	19 Km	Rp	80,000
		Sawit Permai	20 Km	Rp	100,000
		Buana Makmur	20 Km	Rp	100,000
		Lubuk Tilan	20 Km	Rp	100,000
		Sialang Sakti	26 Km	Rp	100,000
		Pangkalan Pisang	8 Km	Rp	50,000
		Buatan II	8 Km	Rp	50,000
		Sengkemang	8 Km	Rp	50,000
6	SABAK AUH	Empang Pandan	8 Km	Rp	50,000
		Rantau Panjang	10 Km	Rp	80,000
		Buatan II	11 Km	Rp	80,000
		Tasik Seminai	15 Km	Rp	80,000
		KerANJI Guguh	16 Km	Rp	80,000
		Teluk Rimba	13 Km	Rp	80,000
		Sri Gemilang	13 Km	Rp	80,000
		Kuala Gasib	30 Km	Rp	120,000
		Bandar Pedada	0-5 Km	Rp	50,000
		Bandar Sungai	0-5 Km	Rp	50,000
7	SUNGAI APIT	Sabak Permai	5 Km	Rp	50,000
		Sungai Tengah	6 Km	Rp	50,000
		Belading	6 Km	Rp	50,000
		Laksamana	8 Km	Rp	50,000
		Rempak	8 Km	Rp	50,000
		Selat Guntung	10 Km	Rp	80,000
		Sungai Apit	0-5 Km	Rp	50,000
		Teluk Batil	0-5 Km	Rp	50,000
		Parit I/II	0-5 Km	Rp	50,000
		Desa Kayu Ara Permai	0-5 Km	Rp	50,000
8	PUSAKO	Harapan	0-5 Km	Rp	50,000
		Sungai Kayu Ara	5 Km	Rp	50,000
		Tanjung Kuras	10 Km	Rp	80,000
		Teluk Mesjid	10 Km	Rp	80,000
		Lalang	10 Km	Rp	80,000
		Bunsur	15 Km	Rp	80,000
		Mengkapan	20 Km	Rp	100,000
		Sungai Rawa	20 Km	Rp	100,000
		Rawa Mekar Jaya	20 Km	Rp	100,000
		Penyengat	20 Km	Rp	160,000
9	LUBUK DALAM	Teluk Lanus	20 Km	Rp	1,000,000
		Benayah	7 Km	Rp	50,000
		Perbadaran	12 Km	Rp	80,000
		Dusun Pusaka	12 Km	Rp	80,000
		Dosan	12 Km	Rp	80,000
		Perincit	13 Km	Rp	80,000
		Sei Limau	13 Km	Rp	80,000
		Sei Bebari	14 Km	Rp	80,000
		Rawang Kao	5 Km	Rp	50,000
		Sialang Baru	5 Km	Rp	50,000
		Lubuk Dalam I	5 Km	Rp	50,000
		Sri Gading	10 Km	Rp	80,000
		Empang Baru	10 Km	Rp	80,000
		Sialang Palas	10 Km	Rp	80,000
		Lubuk Dalam II	10 Km	Rp	80,000

1	2	3	4	5	6
10	KERINCI KANAN	K.Kanan Delima Jaya Buana Bhakti Seminai Bukit Harapan Buatan Baru Kumbara Utama Simpang Perak Jaya Jati Mulya Gabung Makmur Bukit Agung Kerinci Kiri	0-5 Km 5 Km 8 Km 8 Km 10 Km 12 Km 15 Km 15 Km 15 Km 19 Km 20 Km 22 Km	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50,000 50,000 50,000 50,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 100,000 100,000
11	TUALANG	Tualang Pinang Sebatang Meredan Tualang Timur	0-5 Km 5 Km 8 Km 10 Km	Rp Rp Rp Rp	50,000 50,000 50,000 80,000
12	PERAWANG	Perawang Barat Kelurahan Perawang Maredan Barat Pinang Sebatang Barat Pinang Sebatang Timur	0-5 Km 0-5 Km 10 Km 15 Km 15 Km	Rp Rp Rp Rp Rp	50,000 50,000 80,000 80,000 80,000
13	SUNGAI MANDAU	Muara Bungkal Muara Kelantan Lubuk Jering Sei Selodang Oiak Bencah Umbai Teluk Lancang Tasik Betung Lubuk Umut	± 7 Km ± 9 Km ± 7 Km ± 7 Km ± 15 Km ± 22 Km ± 10 Km ± 28 Km ± 32 Km	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50,000 50,000 50,000 50,000 80,000 100,000 80,000 250,000 150,000
14	MINAS	Minas Jaya (Takuana) Minas Barat (Km 33) Minas Timur (Km 4) Rantau Bertuah Mandi Angin	5 Km 5 Km 10 Km 25 Km 30 Km	Rp Rp Rp Rp Rp	50,000 50,000 80,000 200,000 200,000
15	KANDIS	Simpang Belutu Telaga Sam-Sam Kandis Kota Kandis Bekalar Libo Jaya Jambai Makmur Sam-Sam Belutu Pencing Bekulo Sungai Gondang	5 Km 5 Km 7 Km 10 Km 10 Km 15 Km 15 Km 15 Km 20 Km 20 Km 30 Km	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50,000 50,000 50,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 100,000 250,000 250,000

D. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK KE KOTA/KABUPATEN LAIN (PP)

NO	KOTA	UANG TRANSPORTASI	SATUAN
1	SIAK - PEKANBARU	Rp. 200.000	OT
2	SIAK - KAMPAR	Rp. 300.000	OT
3	SIAK - ROKAN HULU	Rp. 500.000	OT
4	SIAK - ROKAN HILIR	Rp. 600.000	OT
5	SIAK - BENGKALIS	Rp. 200.000	OT
6	SIAK - PELALAWAN	Rp. 150.000	OT
7	SIAK - DUMAI	Rp. 500.000	OT
8	SIAK - INDRAGIRI HULU	Rp. 500.000	OT
9	SIAK - INDRAGIRI HILIR	Rp. 600.000	OT
10	SIAK - KUANTAN SINGINGI	Rp. 500.000	OT
11	SIAK - KEPULAUAN MERANTI	Rp. 350.000	OT

Catatan :

Khusus Perjalanan Dinas Pada Kegiatan yang sifatnya Konsultasi/Koordinasi dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) hari untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

E. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DALAM NEGERI LUAR KABUPATEN

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN		PENGINAPAN		SATUAN
		STAF PNS GOL III (Rp.)	STAF PNS GOL II (Rp.)	STAF PNS GOL III (Rp.)	STAF PNS GOL II (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	360,000	360,000	556,000	556,000	OH
2	SUMATERA UTARA	370,000	370,000	530,000	530,000	OH
3	RIAU	370,000	370,000	852,000	852,000	OH
4	KEPULAUAN RIAU	370,000	370,000	792,000	792,000	OH
5	JAMBI	370,000	370,000	580,000	580,000	OH
6	SUMATERA BARAT	380,000	380,000	650,000	650,000	OH
7	SUMATERA SELATAN	380,000	380,000	861,000	861,000	OH
8	LAMPUNG	380,000	380,000	580,000	580,000	OH
9	BENGKULU	380,000	380,000	630,000	630,000	OH
10	BANGKA BELITUNG	410,000	410,000	622,000	622,000	OH
11	BANTEN	370,000	370,000	718,000	718,000	OH
12	JAWA BARAT	430,000	430,000	570,000	570,000	OH
13	D.K.I JAKARTA	530,000	530,000	730,000	730,000	OH
14	JAWA TENGAH	370,000	370,000	600,000	600,000	OH
15	D.I YOGYAKARTA	420,000	420,000	845,000	845,000	OH
16	JAWA TIMUR	410,000	410,000	664,000	664,000	OH
17	BALI	480,000	480,000	910,000	910,000	OH
18	NUSA TENGGARA BARAT	440,000	440,000	580,000	580,000	OH
19	NUSA TENGGARA TIMUR	430,000	430,000	550,000	550,000	OH
20	KALIMANTAN BARAT	380,000	380,000	538,000	538,000	OH
21	KALIMANTAN TENGAH	360,000	360,000	659,000	659,000	OH
22	KALIMANTAN SELATAN	380,000	380,000	540,000	540,000	OH
23	KALIMANTAN TIMUR	430,000	430,000	804,000	804,000	OH
24	KALIMANTAN UTARA	430,000	430,000	804,000	804,000	OH
25	SULAWESI UTARA	370,000	370,000	782,000	782,000	OH
26	GORONTALO	370,000	370,000	764,000	782,000	OH
27	SULAWESI BARAT	410,000	410,000	704,000	782,000	OH
28	SULAWESI SELATAN	430,000	430,000	732,000	782,000	OH
29	SULAWESI TENGAH	370,000	370,000	951,000	782,000	OH
30	SULAWESI TENGGARA	380,000	380,000	786,000	782,000	OH
31	MALUKU	430,000	430,000	667,000	782,000	OH
32	MALUKU UTARA	430,000	430,000	600,000	782,000	OH
33	PAPUA	580,000	580,000	829,000	782,000	OH
34	PAPUA BARAT	480,000	480,000	718,000	782,000	OH

- Catatan :
1. Khusus Perjalanan dinas Pada Kegiatan yang sifatnya konsultasi/Koordinasi dilaksanakan Selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 2. Penghulu/Ketua BAPEKAM disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya/Wakil/Sekretaris/Anggota BAPEKAM disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II.

F. BIAYA TRANSPORTASI DARI PEKANBARU KE IBUKOTA NEGARA DAN PROVINSI LAIN DI SELURUH INDONESIA (PP)

NO	TUJUAN	TRANSPORTASI PP		KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
1	ACEH	6,500,000	3,700,000	
2	BANTEN	6,610,800	3,500,000	
3	BALIK PAPAN	10,996,000	5,423,000	
4	BANDAR LAMPUNG	6,482,000	3,433,000	
5	BANDUNG	6,525,000	3,701,000	
6	BANJARMASIN	9,049,000	4,696,000	
7	BATAM	8,707,000	4,599,000	
8	BENGKULU	9,077,000	3,000,000	
9	BIAK	16,985,000	8,781,000	
10	DENPASAR	9,092,000	4,942,000	
11	GORONTALO	8,750,000	5,800,000	
12	JAMBI	7,000,000	4,500,000	
13	JAKARTA	5,583,000	3,016,000	

1	2	3	4	5
14	JAYAPURA	17,435,000	9,380,000	
15	KALIMANTAN UTARA	13,751,200	7,390,000	
16	KENDARI	11,220,000	5,776,000	
17	MALANG	8,461,000	4,439,000	
18	MALUKU	8,750,000	5,800,000	
19	MALUKU UTARA	8,750,000	5,800,000	
20	MANADO	14,055,000	6,599,000	
21	MATARAM	9,102,000	4,909,000	
22	NUSA TENGGARA TIMUR	10,800,000	6,500,000	
23	PALANGKARAYA	8,803,000	4,696,000	
24	PANGKAL PINANG	7,391,000	3,936,000	
25	PONTIANAK	8,247,000	4,514,000	
26	SEMARANG	7,797,000	3,979,000	
27	SOLO	7,797,000	4,118,000	
28	SULAWESI BARAT	8,850,000	5,500,000	
29	SULAWESI SELATAN	15,628,888	5,500,000	
30	SULAWESI TENGAH	8,500,000	6,000,000	
31	SUMATERA BARAT	3,500,000	2,500,000	
32	SUMATERA SELATAN	9,077,200	4,500,000	
33	SUMATERA UTARA	4,000,000	2,500,000	
34	SURABAYA	9,241,000	4,407,000	
35	TIMIKA	16,771,000	8,739,000	
36	YOGYAKARTA	8,022,000	4,054,000	

Catatan :
 Port Tax adalah boarding pass dan airport tax dan/atau retribusi yang dipungut di terminal bus/
 stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI